

ABSTRAK

DAMPAK KEBIJAKAN PP NO 55 TAHUN 2022 DAN PENGAWASAN *ACCOUNT REPRESENTATIVE* PADA KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM

(Studi Kasus Pada KPP Pratama Bandung Cicadas)

Disusun Oleh:

Erni Sumarni

Peraturan Pemerintah No 55 tahun 2022 merupakan aturan pengganti dari PP 23 Tahun 2018 yang secara khusus mengatur mengenai pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima dari wajib pajak yang memiliki peredaran bruto. Dimana para pelaku UMKM dengan jumlah omzet 1 tahun tidak lebih dari 4,8 Miliar rupiah dikenakan pajak 0,5% sedangkan <500 juta tidak dikenakan pajak. Kemudian tugas *Account Representative* berdasarkan PMK No 45/PMK.01/2021 yaitu fokus pada pengawasan.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dampak Kebijakan PP No 55 Tahun 2022 dan Pengawasan *Account Representative* pada Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif. Populasi pada penelitian ini sebanyak 2.833 Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Bandung Cicadas, dengan sampel pada penelitian ini sebanyak 100 Wajib Pajak UMKM yang memiliki peredaran bruto <4,8M. Data yang digunakan adalah data sekunder dari laporan tahunan dan data primer dengan pengambilan data menggunakan instrumen penelitian berupa kuesioner yang disebarakan secara langsung ke wajib pajak UMKM. Analisis data menggunakan uji statistik yang diperoleh dengan bantuan SPSS 25 dengan pengujian Uji instrumen penelitian, Uji asumsi klasik, Uji regresi linier berganda, Uji F dan Uji T dan Uji Koefisien Determinasi. Hasil penelitian menyatakan bahwa Kebijakan PP No 55 Tahun 2022 dan Pengawasan *Account Representative* (AR) berpengaruh pada Kepatuhan Wajib Pajak UMKM sebesar 61,2%.

Kata Kunci: UMKM, PP No 55 Tahun 2022, Pengawasan *Account Representativ* dan Kepatuhan Wajib Pajak.

ABSTRACT

IMPACT OF POLICY PP NO 55 OF 2022 AND REPRESENTATIVE ACCOUNT SUPERVISION ON MSME TAXPAYER COMPLIANCE

(Case Study at KPP Pratama Bandung Cicadas)

Arranged by:

Erni Sumarni

Government Regulation No. 55 of 2022 is a replacement regulation for PP 23 of 2018 which specifically regulates tax income on business income received from taxpayers who have gross turnover. Where MSME players with a 1 year turnover of no more than 4.8 billion rupiah are subject to 0.5% tax while <500 million is not subject to tax. Then the Account Representative's duties are based on PMK No. 45/PMK.01/2021, namely to focus on supervision.

This research aims to examine the impact of PP Policy No. 55 of 2022 and Supervision of Account Representatives on MSME Taxpayer Compliance. This research uses a quantitative approach with descriptive methods. The population in this study was 2,833 MSME taxpayers registered at KPP Pratama Bandung Cicadas, with a sample in this study of 100 MSME taxpayers who had a gross turnover of <4.8 billion. The data used is secondary data from annual reports and primary data by collecting data using research instruments in the form of questionnaires which are distributed directly to MSME taxpayers. Data analysis uses statistical tests obtained with the help of SPSS 25 by testing research instrument tests, classical assumption tests, multiple linear regression tests, F tests and T tests and coefficient of determination tests. The research results stated that PP Policy No. 55 of 2022 and Supervision of Account Representatives (AR) had an effect on MSME Taxpayer Compliance by 61.2%.

Keywords: MSMEs, PP No. 55 of 2022, Supervision of Representative Accounts and Taxpayer Compliance.